

## EVALUASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK

Muhammad Luqman Abdul Aziz<sup>1</sup>, Calvin Edo Wahyudi<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Correspondent author: [kalvinedo.adne@upnjatim.ac.id](mailto:kalvinedo.adne@upnjatim.ac.id)

Surabaya, 60294, Indonesia

### Abstract

*This research aims to determine the level of success of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Cerme District, Gresik Regency. The research method used in this research is qualitative descriptive research. The research focus in this study is to describe the evaluation of the Non-cash Food Assistance Program (BPNT) in Cerme District, Gresik Regency. Data collection techniques in this research include interviews, observation, documentation and literature study. The data sources used are primary and secondary data sources. The results of research on the Evaluation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Cerme District, Gresik Regency, namely: that the BPNT program is useful in helping meet their economic needs even though the assistance provided is not commensurate with their food needs until the following month and assistance from last year was given alternately in the form of goods or given in cash. This is because the BPNT program plays a more or less significant role in meeting their daily needs, and also provides them with sufficient relief in meeting the food needs of underprivileged communities. Based on the conclusions, the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Cerme District, Gresik Regency, can be said to be quite successful.*

**Keywords:** Evaluation; Non-Cash Food Assistance Program; Public policy

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai Evaluasi Program Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) Di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, yaitu: bahwa program BPNT bermanfaat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka meskipun bantuan yang diberikan tidak sebanding dengan kebutuhan pangannya hingga bulan selanjutnya dan bantuan dari tahun kemarin diberikan secara berganti-ganti berupa barang atau diberikan secara tunai. Hal ini karena program BPNT sedikit banyak cukup berperan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, dan juga cukup memberikan mereka keringanan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu. Berdasarkan kesimpulan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik bisa dikatakan Cukup Berhasil.

**Kata Kunci:** Evaluasi; Kebijakan public; Program Bantuan Pangan Non Tunai

## PENDAHULUAN

Dalam mengkaji studi implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel-variabel atau faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa model implementasi yang dapat digunakan sebagai acuan, seperti menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020). Demikian juga menurut argumen Grindle (dalam Elwan.L.O.M, 2011: 22) bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh derajat dapat tidaknya kebijakan itu diterapkan atau implementabilitas (*implementability*). Implementabilitas ini dapat dilihat dari aspek isi kebijakan (*content of policy*) dan aspek konteks implementasi kebijakan (*contexs of policy implementation*) (Supriadin et al., 2020).

Teori implementasi Mirelee Grindle (Grindle, 2017) kemudian digunakan pada dua level (diterjemahan dari Bahasa Inggris):

1. Pertama, akan terlihat secara umum bagaimana implementasi kebijakan yang dikaji menjawab pertanyaan "apa yang terjadi" dan "bagaimana". Grindle mengatakan, proses implementasi kebijakan perlu melihat proses kebijakan hingga tingkat program tertentu dan alokasi pendanaannya.
2. Kedua, untuk membantu menjelaskan temuan tahap pertama yaitu menjawab pertanyaan "mengapa", dilihat bagaimana interaksi proses implementasi dengan hal-hal yang secara umum menurut Grindle menentukan keberhasilan kebijakan yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya.

Kemudian menurut pendapat Grindle biasanya diuraikan dan disesuaikan dengan kajian implementasi model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Markulis, 1985) yang menggunakan enam (6) indikator implementasi kebijakan, yaitu: (1) standar kebijakan dan tujuan; (2) sumber daya; (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) komunikasi antar organisasi terkait pelaksanaan kegiatan; (5) sikap pelaksana dan (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. (Ode et al., 2023) (Ode et al., 2023)

Pada konteks ini, substansi kajiannya adalah bagaimana pembangunan itu dapat memberikan wujud nyata dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat. Oleh itu, kondisi ini diharapkan agar pembangunan nasional dapat mengubah seluruh aspek kehidupan suatu negeri dari kondisi sekarang ke masa depan yang lebih baik. Salah satu solusi yang coba diselesaikan dari pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah adalah upaya untuk pengentasan kemiskinan. Kemiskinan ialah kondisi saat seseorang serta sekelompok orang yang tidak mampu

memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Arfiani, 2020).

Problematika kemiskinan yang cukup banyak membuat penanganan yang ada harus melibatkan semua pihak untuk bekerja sama dan melakukan kordinasi yang optimal. Sesuai data Badan Pusat Stasistik (BPS) Indonesia pada maret tahun 2021 masyarakat miskin yang ada di Indonesia berjumlah 27,45 juta jiwa. Populasi masyarakat miskin meningkat 0,36% dari sebelumnya 26,42 juta jiwa pada maret 2020. Dimana jumlah tersebut membuat tingkat kemiskinan mencapai 10,14% dari total populasi nasional pada tahun 2021.

Mengingat angka persentase masyarakat miskin di Indonesia masih cukup tinggi dan bahkan beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan persentase masyarakat miskin, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat berbagai program pada mengurangi angka persentase masyarakat miskin tersebut.

**Tabel 1.** Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gresik (Ribu Jiwa)

Tahun	Jumlah Ribu Jiwa
2017	164,08
2018	154,02
2019	148,61
2020	164,05
2021	166,35
2022	149,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2023

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik yaitu wilayah yang ada di Jawa Timur yang mempunyai jumlah masyarakat miskin yang mulai mengalami naik turun pada tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 Jumlah Masyarakat Miskin di Kabupaten Gresik mencapai 164 ribu jiwa dengan presentase masyarakat miskin 12,80%, pada tahun 2018 Jumlah Masyarakat Miskin mulai sedikit turun sebanyak 154 ribu jiwa dengan presentase masyarakat miskin 11,89% dan pada tahun 2019 tercatat Jumlah Masyarakat Miskin sebesar 148 ribu jiwa dengan presentase masyarakat miskin 11,35% dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat signifikan tercatat Jumlah Masyarakat Miskin sebesar 166 ribu jiwa dimana presentase Jumlah Masyarakat Miskin Provinsi maka Kabupaten Gresik tergolong mempunyai kemiskinan yang masih relatif tinggi, dimana presentase masyarakat miskin Kabupaten Gresik pada tiga tahun terakhir masih diatas presentase provinsi. Oleh karena hal tersebut pemerintah Kabupaten Gresik perlu melakukan berbagai upaya-upaya yang harus di lakukan pada rangka mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut.

Beberapa upaya bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang diberikan kepada masyarakat yang ada untuk mengurangi beban masyarakat yaitu pemenuhan kebutuhan pokok masyarkat ialah beberapa program dari pemerintah program Beras Sejahtera (RASTRA) yang saat ini diganti dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).Program bantuan pangan non tunai (BPNT) yaitu bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai

dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan bank himpunan Bank Negeri (Julianto, 2020).

**Tabel 2.** Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	BPNT
1	Wringinanom	5.441
3	Bungah	4.415
4	Balongpanggang	3.950
5	Tambak	2.022
6	Kebomas	4.541
7	Manyar	5.122
8	Kedamean	5.469
9	Ujung Pangkah	4.967
10	Sidayu	4.259
11	Benjeng	5.756
12	Sangkapura	3.614
13	Cerme	4.676
14	Duduksampeyan	4.321
15	Gresik	2.357
16	Panceng	4.178
17	Driyorejo	4.023
18	Dukun	5.853
	<b>Total</b>	<b>77.184</b>

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gresik, 2023

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa Kecamatan Cerme memiliki jumlah KPM BPNT sebanyak 4.676 KPM. Mengingat jumlah KPM BPNT yang cukup banyak, hal ini tentunya perlu perhatian lebih dalam implementasi program BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat. Sehingga bantuan tersebut sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.

Mengingat Program Bantuan Non Tunai (BPNT) yaitu program dari pemerintah pusat serta melihat adanya presentase masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Gresik mengalami kenaikan, sehingga Kabupaten Gresik yaitu beberapa wilayah di Indonesia yang diterapkannya program tersebut. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilaksanakan secara bertahap terhadap uang tunai yang akan diterima penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terutama di Kecamatan Cerme.

Setiap program pasti memiliki problematika yang ada itu juga yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada imlementasi program BPNT yang ada di Kecamatan Cerme, maka perlu dilihat evaluasi dari pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Kurniawan, 2021) bahwa suatu kebijakan program yang telah dilaksanakan haruslah diukur melalui evaluasi agar hasil yang dicapai diketahui, apakah hasil tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan serta hasil tersebut jauh menyimpang dari yang diharapkan. Evaluasi kebijakan akan lebih mudah dipahami apabila

pada memahaminya menggunakan suatu kerangka pemikiran tertentu. BPNT mempunyai beberapa faktor penentu sikap yang kurang berhasil pada implementasi program tersebut (Yunus, 2019).

Oleh karena itu jika melihat uraian diatas menjadi sesuatu yang urgent untuk diteliti karena apabila banyak problematika yang ada tersebut kalau tidak segera dievaluasi maka akan kembali terjadi lagi dan juga menimbulkan problematika baru, dan tujuan yang ditetapkan sebelumnya pada program BPNT tidak akan bisa tercapai. Evaluasi dari program BPNT harus berjalan dengan lancar dengan bertujuan agar dapat mengetahui tingkat keberhasilan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan dan memberikan penjelasan mengenai hal-hal tertentu tanpa melihat keadaan di luar dari kelompok, fenomena, subjek, dan objek yang diteliti. Lokasi penelitian dilakukan pada wilayah Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Lokasi tersebut dipilih karena Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik mempunyai jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (KPM BPNT) yang cukup banyak di Kabupaten Gresik.

Fokus penelitian yaitu penjelasan dari kerangka berfikir yang telah dibuat sebelumnya. Fokus pada penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan permasalahan dimana permasalahan penelitian dijadikan sebagai acuan pada menentukan fokus penelitian. Pada penelitian ini sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan mengenai Evaluasi Program Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) Di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini diuraikan hasil penelitian berupa temuan temuan di lapangan berdasarkan pengamatan penulis pada kejadian dan peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Angka presentase penduduk miskin di Indonesia cukup tinggi dan bahkan beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan presentase penduduk miskin, maka pemerintah membuat berbagai program dalam mengurangi angka presentase penduduk miskin tersebut yang dimana salah satunya yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program, maka dibutuhkan suatu evaluasi. Evaluasi program mempersoalkan apa yang sesungguhnya telah terjadi sebagai dari hasil sebuah kebijakan suatu program dengan apa yang terjadi setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Akan dijabarkan lebih lanjut berdasarkan teori William N. Dunn. Berikut secara rinci dari setiap kriteria evaluasi menurut Dunn dikutip oleh Nugroho (2018:786).

### **Efektivitas**

Efektivitas merupakan hal yang berkaitan dengan suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan memberikan fokus pada tujuan yang diinginkan. Keinginan pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan merupakan bentuk penyelesaian masalah-masalah publik yang berada dilingkungan masyarakat yang dapat teratasi dengan maksimal. Untuk melihat tingkat keefektifan dari BPNT di Kecamatan Cerme terdapat sasaran kajian yang digunakan yakni menurut Budiani dikutip oleh Maijun & Utama (2013) sebagai dasar pengetahuan apakah program tersebut sudah berjalan seperti yang diharapkan yakni sebagai berikut:

Ketepatan sasaran program, yaitu kesesuaian peserta program dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian apabila ditemukan kondisi ekonomi yang ternyata sudah layak dan sudah memenuhi kriteria penerima bantuan, maka pihak yang ada dapat melaporkan hal tersebut kepada pemerintah desa dan nanti pemerintah desa akan melaporkan ke Kementerian Sosial melalui website SIKS-NG. Selain pelaporan dari pihak pemerintah masyarakat juga harus memiliki kesadaran yang tinggi sebagai penerima bantuan. Karena kalau masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi yang sudah mampu akan mengundurkan diri dan tidak akan menerima bantuan lagi dibulan berikutnya. Sehingga ketepat sasaran program BPNT bisa terlihat cukup tepat pada sasarannya kepada masyarakat miskin sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan sesuai dengan data yang tersedia selalu dilakukan perbaikan dan selalu di *update* data tersebut oleh pihak desa.

Sosialisasi program, dimana kemampuan penyelenggara program melakukan sosialisasi, sehingga informasi pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Yang dalam hal ini dilihat melalui kemampuan para pelaksana, materi yang diberikan, dan metode sosialisasi yang digunakan. Diketahui bahwa bantuan ini sudah dikoordinasikan dan disosialisasikan oleh pihak-pihak terkait baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hingga kepada penerima bantuan KPM. Setelah program tersebut dikorrdisasikan dan

disosialisasikan oleh pihak-pihak terkait, maka pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial dan pertemuan kelompok yang dilakukan. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui grup WhatsApp. Namun dengan metode sosialisasi yang dilakukan masih belum menjangkau ke seluruh masyarakat penerima bantuan sehingga masih terdapat penerima bantuan yang tidak tahu mengenai bantuan tersebut.

Tujuan program, yaitu kesesuaian hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai terdapat tujuan program pemberian BPNT, yaitu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM. Bantuan yang diberikan sendiri sudah sesuai dengan tujuan adanya program ini. Masyarakat menilai dengan adanya program BPNT dapat membantu mereka dalam meringankan beban biaya pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Dengan adanya BPNT memberikan pengaruh yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga mereka sehari-hari. Meskipun dari jumlah bantuan yang diberikan tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka selama sebulan penuh hingga bantuan selanjutnya akan diberikan. Selain itu bantuan yang diberikan dipilih karena bertujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM. Sehingga bantuan yang telah diberikan memenuhi syarat minimal bahan pangan yang mengandung karbohidrat, protein nabati, protein hewani, serta sumber vitamin dan mineral meskipun terkadang bantuan ini juga diberikan secara tunai.

Pemantuan program, salah satu kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu program serta mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan BPNT apakah terdapat permasalahan sehingga permasalahan yang ada dapat ditindak lanjuti. Adanya pelaksanaan pemantuan terkait program BPNT di Kecamatan Cerme. Namun meskipun adanya pemantuan atau pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait terutama oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik, realitanya dilapangan masih beberapa kali terjadi permasalahan mengenai kualitas dari bantuan yang diberikan seperti bahan pangan yang tidak layak konsumsi. Mengenai kualitas bantuan yang tidak layak konsumsi dapat terjadi karena adanya keteledoran dari pihak terkait yang melakukan pemantuan dan pengawasan program BPNT.

### **Efisiensi**

Efisiensi berhubungan dengan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk `mencapai hasil dari yang diinginkan. Fokus dari kriteria ini adalah banyaknya usaha yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan program BPNT meliputi sumber daya yang digunakan baik alokasi tenaga (SDM), estimasi waktu, dan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana serendah-

rendahnya. Untuk melihat tingkat keefesiensian dari BPNT di Kecamatan Cerme terdapat 2 (dua) sasaran kajian yang digunakan yakni menurut Rusydiana (2018:49) ada dua hal yang menjadi sasaran kajian sebagai dasar pengetahuan apakah program tersebut sudah berjalan seperti yang diharapkan yakni sebagai berikut:

Efisien sumber daya, Program BPNT di Kecamatan Cerme terdapat banyak usaha atau sumber daya manusia yang terlibat dalam pemberian BPNT ini mulai dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Gresik, Pendamping Sosial dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Kepala Desa dan Agen penyalur BPNT dari pemantuan hingga proses penyaluran bantuan. Sehingga bantuan yang ada dapat diterima oleh KPM.

Efisiensi Waktu, Program BPNT di Kecamatan Cerme bisa diketahui bahwa proses penyaluran BPNT dapat dikatakan tepat waktu setiap bulan dengan waktu pengambilan yang terbilang cukup cepat. Meskipun terkadang bantuan BPNT tersebut diambil beberapa kali dalam satu bulan (digabung).

### **Kecukupan**

Fokus kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah. Kriteria ini lebih mempersoalkan kecukupan hasil kebijakan dalam mengatasi masalah kebijakan atau seberapa jauh pencapaian tujuan yang sudah dirasakan dalam menjawab persoalan yang dialami masyarakat miskin. Untuk melihat tingkat kecukupan dari BPNT di Kecamatan Cerme dapat dilihat dengan sasaran kajian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menurut Damanik & Marom (2016:226):

Program BPNT memecahkan permasalahan masyarakat yang diakibatkan oleh kemiskinan dan ketimpangan pangan, Yang dimaksud dalam hal ini yakni dimana BPNT dapat memecahkan permasalahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan hidupnya. Bahwa program BPNT masih belum bisa memecahkan masalah yang ada di masyarakat mengenai banyaknya pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan pangan keluarga mereka. Dengan jumlah uang 200 ribu dan jumlah barang yang diterima masyarakat merasa belum cukup memenuhi kebutuhan mereka selama satu bulan, maksimal bantuan yang mereka terima bertahan selama 2 minggu saja. Sehingga meskipun BPNT mampu mengurangi beban hidup keluarga mereka, namun program BPNT ini hanya memberikan manfaat yang terbatas ke mereka karena tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka terutama kebutuhan pangan hingga bulan selanjutnya bantuan diberikan.

Dilihat dari segi perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir masyarakat setelah adanya program BPNT. Pengukuran kecukupan juga dapat dilihat dari perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir masyarakat setelah adanya program BPNT. Dapat diketahui bahwa dengan adanya BPNT juga dapat merubah sikap, perilaku, dan pola pikir masyarakat tersebut. Hal ini

terjadi karena masyarakat lebih bersyukur dan bersikap terbuka atas bantuan yang telah diberikan meskipun dengan jumlah bantuan yang terbatas dan seadanya, masyarakat berggapan bahwa setidaknya bantuan ini cukup membantu mereka. Masyarakat juga lebih sadar lagi bahwa dengan kemampuan masing-masing, sehingga kalau ada yang sudah mampu harus mengundurkan diri sebagai penerima bantuan karena masih banyak masyarakat lain yang membutuhkan bantuan ini.

### **Perataan**

Perataan berkenaan dengan apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Kriteria perataan dalam kebijakan publik dapat juga diartikan suatu keadilan yang diberikan dan diperoleh dari suatu kebijakan publik. Dalam hal ini yaitu menganalisis pendistribusian secara merata kepada kelompok masyarakat, khususnya kelompok masyarakat penerima manfaat BPNT. Untuk melihat tingkatan perataan dari BPNT di Kecamatan Cerme dapat dilihat dengan sasaran kajian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menurut Duri & Rahmah (2020:50):

Pemerataan pendistribusian program BPNT, dapat diketahui bahwa pendistribusian BPNT sudah merata ke semua masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Cerme. Hal ini dapat terjadi karena selalu dilakukan verifikasi, verifikasi dan survey langsung yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun kecamatan mengenai kelayakan penerima bantuan. Sehingga selalu ada update data mengenai penerima BPNT.

Berkurangnya jumlah masyarakat miskin, bahwa dengan adanya program BPNT tidak bisa mengetahui apakah program ini dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin atau tidak. Karena penurunan jumlah masyarakat miskin tidak hanya akibat adanya program BPNT saja melainkan juga ada bantuan lainnya yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Selain itu dari data yang ada Tahun 2021 angka penduduk miskin mengalami peningkatan yang sangat signifikan karena adanya pandemi yang melanda di seluruh wilayah yang ada di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya pembatasan kegiatan secara besar-besaran dan secara tidak langsung itu pula yang juga berdampak pada peningkatan angka penduduk miskin.

### **Responsibilitas**

Responsibilitas berkenaan dengan apakah kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Kriteria ini lebih kepada aspek kepuasan masyarakat khususnya kelompok sasaran atas hasil kebijakan. Apakah hasil kebijakan yang dicapai telah memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu atau tidak. Untuk melihat tingkat perataan dari BPNT di Kecamatan Cerme dapat dilihat dengan sasaran kajian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menurut Akibu (2014:10):

Tanggapan kelompok sasaran mengenai apakah program BPNT memenuhi kebutuhannya, Responsibilitas dalam pelaksanaan BPNT salah satunya dapat dilihat dari

tanggapan masyarakat mengenai adanya program BPNT. Bahwa masyarakat di Kecamatan Cerme sudah merasa puas dengan program BPNT. Pada dasarnya program BPNT sendiri mampu membantu masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan pangan. Masyarakat merasa cukup terbantu meskipun bantuan yang diberikan tidak dapat bertahan hingga bantuan di bulan selanjutnya diberikan. Meskipun bantuan sekarang sudah diberikan secara tunai akan tetapi masyarakat lebih suka bantuan diberikan seperti dulu berupa barang seperti beras, ayam dan buah-buahan.

Kelompok rentan dan terdampak mendapatkan preferensi (prioritas) program BPNT, Responsibilitas dalam pelaksanaan BPNT juga dapat dilihat dari kelompok sasaran yang mendapatkan prioritas seperti masyarakat yang rentan. Dapat diketahui bahwa program BPNT di Kecamatan Cerme diperuntukan untuk warga yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Prioritas menjadi penerima BPNT diberikan kepada warga yang datanya ada di DTKS yang datanya terpadu secara resmi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat dan diutamakan untuk warga kurang mampu.

### **Ketepatan**

Kriteria ketepatan ini menganalisis tentang kebergunaan hasil kebijakan, yaitu apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat khususnya kelompok sasaran. Untuk melihat tingkat pemerataan dari BPNT di Kecamatan Cerme dapat dilihat dengan sasaran kajian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menurut Lejiu (2014:524):

Hasil yang dicapai bermanfaat atau bernilai bagi masyarakat, bahwa program BPNT bermanfaat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka meskipun bantuan yang diberikan tidak sebanding dengan kebutuhan pangannya hingga bulan selanjutnya dan bantuan dari tahun kemarin diberikan secara berganti-ganti berupa barang atau diberikan secara tunai. Hal ini karena program BPNT sedikit banyak cukup berperan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, dan juga cukup memberikan mereka keringanan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu. Meskipun begitu bantuan yang diberikan belum bisa mengetahui apakah sudah bermanfaat/bernilai bagi masyarakat dikarenakan program ini sudah diberikan dalam bentuk tunai dari akhir tahun kemarin sampai sekarang.

Membandingkan antara manfaat yang ada pada peraturan dengan kenyataan yang ada di lapangan, Ketepatan dalam pelaksanaan BPNT dapat dilihat dari membandingkan antara peraturan yang mengatur mengenai BPNT yakni Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan yang ada di lapangan. Dapat diketahui bahwa teknis penyaluran program BPNT yang ada di Kecamatan Cerme sudah sesuai dengan yang ada di peraturan yaitu mulai dari

penyiapan data penerima bantuan, penyiapan agen penyalur, bank penyalur dan kantor pos, kemudian pemberitahuan kepada calon penerima bantuan dan dilakukan sosialisasi dan edukasi. Kemudian dilanjutkan registrasi dan aktivasi kartu yang mana ketika bantuan siap diterima kartu tersebut bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengambil bantuan pangan di agen penyalur yang telah disediakan ataupun bisa diambil secara tunai ke bank dan juga melalui kantor pos.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan sebelumnya mengenai Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, sebagaimana yang dikaji melalui 6 indikator teori William N. Dunn (2003) dapat disimpulkan bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum sepenuhnya efektif, meskipun tepat sasaran. Efisiensi terlihat dalam koordinasi penyaluran bantuan yang melibatkan berbagai pihak. Namun, bantuan yang terbatas tidak cukup memenuhi kebutuhan masyarakat, dan kurangnya pengawasan terhadap kualitas menjadi tantangan. Meski merata, BPNT belum memberikan dampak besar pada kesejahteraan masyarakat. Respons positif masyarakat terhadap BPNT, tetapi preferensi masih pada bantuan barang daripada uang tunai. Ketepatan program ini sesuai regulasi, namun manfaatnya sulit diukur karena disalurkan dalam bentuk tunai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Hartawan. (2020). "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 5(1), 59–68.
- Kharisma, I. S., & Rosdiana, W. (2018). "Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui EWarung Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya". *Jurnal Publika*, 6.
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626–642. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>
- Larantika, A., Zauhar, S., Makmur, M., & Setyowati, E. (2017). "Collaboration as a Strategy for Poverty Alleviation". *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(3), 40–48.
- Matana, T. R. (2016). Faktor Penyebab Penduduk Miskin di Kecamatan Lage. *Jurnal Ekomen*, 16(1), 68–77.
- Muryadi, A. D. (2017). "MODEL EVALUASI PROGRAM DALAM PENELITIAN EVALUASI". *JURNAL ILMIAH PENJAS*, 3(1), 1–16.
- Ode, L., Elwan, M., Kadir, A., Rezkiawaty, S. U., & Qomariyah, E. (2023). Implementation of Covid-19 Budget Policy in Southeast Sulawesi ( Case Study of Budget Refocussing and Reallocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets 2020 ). *Journal of*

---

*Governance and Public Policy*, 10(3), 234–252. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108>

- Ramadhan, A. H., & Hidir, A. (2021). "LANSIA PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA BATANG TUMU KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR". *Cross-Border*, 4(1), 166–180.
- Rosaliana, A. & Hardjati, S. (2019). "Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya". *Public Administration Journal*, 2(2), 96-110.
- Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). "IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA BATU". *Journal of Public Sector Innovations*, 3(2).
- Suhardin, Y. (2012). "PERANAN NEGARA DAN HUKUM DALAM MEMBERANTAS KEMISKINAN DENGAN MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM". *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 42(3), 302–317.
- Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. *Journal Publicuho*. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506>
- Winarta, I. W. T., Agung, A., Raka, G., Made, I., & Warmadewa, U. (2020). "Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar". *Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 28–42.
- Yunus, E. Y. (2019). "IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO". *REFORMASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9, 138–152.